

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik pada intinya terkait *good governance* dalam pemenuhan kebutuhan hak-hak masyarakat yang berhubungan dengan kesejahteraan (Pambudi & Hidayat, 2022). *Public service* atau pelayanan publik dengan kualitas terjamin diselenggarakan dalam rangka pencapaian cita-cita *welfare state* (negara kesejahteraan). Masyarakat memiliki tuntutan dan harapan yang besar untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang baik perlu didukung oleh pengawasan penyelenggaraan yang kuat. Pemerintah dapat mewujudkan perbaikan pelayanan publik melalui pembangunan (Kansil, 2022).

Pemerintah sudah mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik sejak dua belas tahun yang lalu, namun fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat keluhan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik hingga saat ini. Permasalahan dasar yang menjadi keluhan masyarakat tersebut yakni: 1) Produk layanan yang dihasilkan masih buruk; 2) proses complain dan penyelesaian sengketa masih kurang jelas; 3) penyelenggaraan pelayanan publik kurang berkualitas, dan; 4) layanan bagi kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan dan warga miskin masih sangat rendah dan kurang mendapatkan akses pelayanan (Mutiara, 2022).

Peningkatan SDM mempunyai makna peningkatan kapasitas dasar penduduk, sehingga dapat memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi

dalam proses pembangunan. SDM yang berkualitas tinggi merupakan modal yang paling penting dalam pembangunan yang akan berperan aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan suatu pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

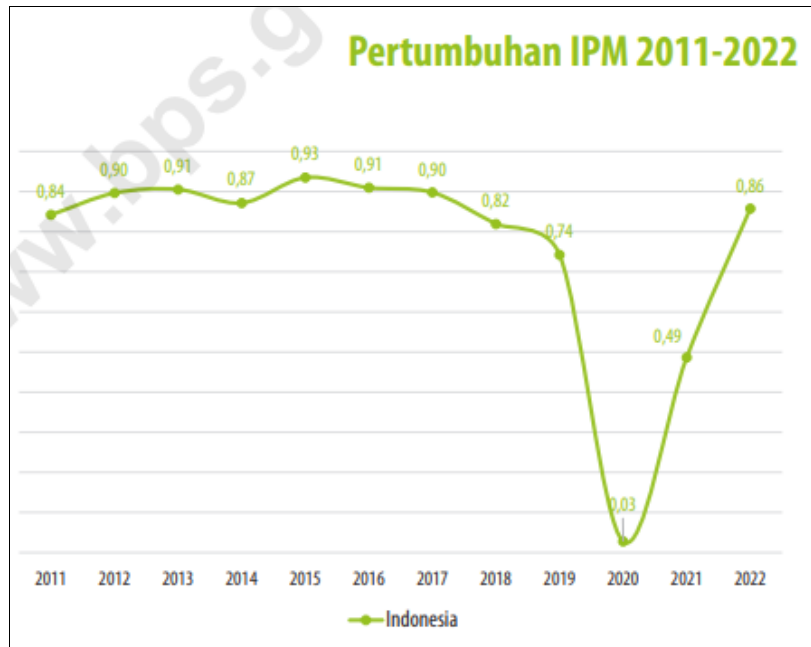
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bertujuan mengukur seberapa besar pencapaian pembangunan manusia yang berbasis dari sejumlah komponen-komponen dasar dari kualitas hidup manusia. Sebagai ukuran dari kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui tiga dimensi pendekatan dasar yaitu kehidupan yang layak, pengetahuan dan umur panjang dan sehat. Ketiga unsur tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Berdasarkan data dari BPS (2023) untuk IPM Nasional Indonesia dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.1 IPM Nasional 2022

No	Indikator	Capaian
1	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,8 Tahun
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,1 Tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,69 Tahun
4	Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 11.479,-

Sumber: BPS (2023).

Hasil pembangunan manusia secara nasional dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2022 karena adanya covid. Namun, 2022 sudah mengalami peningkatan kembali. Berdasarkan indeks pertumbuhan dari tahun 2011-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 1. 1 gambar pertumbuhan IPMa tahun 2011-2022

Sumber: BPS, 2023

Pertumbuhan IPM secara nasional mengalami peningkatan yang sangat rendah yaitu hanya mencapai 0,03 saja. Namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,49 dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 0,86. Peningkatan IPM tersebut secara nasional tidak tersebar merata ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kondisi IPM setiap provinsi yang ada mengalami perbedaan yang signifikan dimana jumlah provinsi yang memiliki IPM dengan kategori baik dengan kategori sedang jumlahnya berbeda signifikan. Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa provinsi dengan kategori sangat tinggi hanya ada 2 provinsi, kategori tinggi sebanyak 24 provinsi, kategori sedang 8 provinsi (BPS, 2023).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik adalah masalah pendapatan asli daerah yang

diperolehnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan (Mariani & Sari, 2022). PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Menurut Fernandes dan Putri (2022) bahwa PAD tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah yaitu segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri (Asmawiah & Sulistiyo, 2022). Pendapatan asli daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang terlihat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah secara masing-masing bisa digunakan sebagai instrumen dibuatnya peraturan dalam kemajuan wilayah (Firmansyah et al., 2022). Tolok ukur kemampuan dan kemandirian otonomi suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah penerimaan APBD yang semakin meningkat (Handayani et al., 2022). Sedikitnya perolehan PAD dapat menjadikan suatu hambatan dan harus segera diperhatikan secara sungguh-sungguh setiap masing-masing pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggali berbagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan Sembiring (2020) yang menunjukkan bahwa pendapat asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia. Hasil penelitian Rivianto et al., (2019) juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan besarnya PAD terhadap belanja pembangunan manusia (IPM). Sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Agus (2020), Kurniasari (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini akan mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah provinsi di Indonesia?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah provinsi di Indonesia?
3. Apakah pendapatan hasil pengelolaan milik daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah provinsi di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah provinsi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh hasil pengelolaan milik daerah terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah provinsi di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini memberikan sumbangsuh perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang mengkaji fakto-faktor yang mempengaruhi belanja pelayanan publik oleh pemerintah

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama dalam pembangunan manusia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada masyarakat tingkat kesejahteraan masyarakat yang ialaminya saat ini.

c. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya ketika ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia yang dilakukan pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dapat dirinci sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serat sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan pelayanan publik Bab ini juga akan menguraikan kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumbe data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini akan menguraikan deskriptif obyek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.